

BAHASA INDONESIA DAN MANIFESTO POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA 1925 SEBAGAI DASAR PERSATUAN KAUM INTELEKTUAL INDONESIA TAHUN 1925 – 1928

Luthfi Nur Rahmad

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : Luthfirahmad@unesa.ac.id

Agus Trilaksana

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : Agustrilaksana@unesa.ac.id

ABSTRAK

Persatuan kaum intelektual Indonesia tidak terjadi begitu saja pada saat dimulainya masa pergerakan nasional. Pola perjuangan di zaman Indonesia klasik yang menjalankan perjuangan kedaerahan masih saja diwarisi pada babak modern perjuangan nasional di awal abad ke XX. Untuk itu fokus penelitian artikel ilmiah ini adalah mengkaji faktor – faktor dari kelompok kaum Intelektual muda Indonesia yang mendatangkan pola persatuan dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Urgensi terhadap persatuan seluruh rakyat Indonesia kemudian diungkapkan oleh Perhimpunan Indonesia melewati prinsip – prinsip barunya yang dideklarasikan pada tahun 1925. Prinsip tersebut kemudian kita kenal dengan sebuah Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia (PI). Di dalam manifesto tersebut masih ada kekurangan, yakni kekurangan akan variabel yang mampu untuk mendatangkan persatuan. Bahasa Indonesia kemudian diteliti sebagai pelengkap di dalam Manifesto Politik PI 1925 sebagai satu – satunya hasil dari Kongres Pemuda II 1928 yang memiliki wujud dan dapat diteliti.

Untuk itu, keterlibatan bahasa Indonesia juga sangat jarang untuk diteliti sebagai objek yang mempengaruhi laju proses persatuan hingga kemerdekaan, untuk itu penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut, 1) Bagaimana manifesto politik PI 1925 mampu mengubah cara pandang masyarakat Bumiputera terkait penjajahan Belanda?, 2) Bagaimana keterkaitan antara manipol PI 1925 dengan bahasa Indonesia?, 3) Bagaimana bahasa Indonesia dapat mengubah mindset serta perilaku kaum intelektual dalam persiapan berbangsa dan bernegara?. Penelitian ini menggunakan metode heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi yang terbatas pada analisis sumber – sumber yang sudah didapat dalam proses pengajuan artikel ilmiah saat ini. Adapun dalam penelitian ini terdapat hasil bahwa didalam mewujudkan persatuan, Bahasa Indonesia dan Manifesto Politik PI adalah dua faktor penting dalam terwujudnya persatuan kaum Intelektual Indonesia.

Kata Kunci :Bahasa Indonesia, Kongres Pemuda II, Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925

ABSTRACT

. The unity of Indonesian intellectuals did not just happen at the start of the national movement in 1908. The pattern of struggle in classical Indonesia that runs regional struggles is still inherited in the modern round of national struggle in the early XX century. Therefore, the focus of this scientific article is to examine the factors of the group of young Indonesian intellectuals who brought a pattern of unity in the struggle against Dutch colonialism. urgency towards the unity of all Indonesian people was then expressed by the Indonesian Society through its new principles that declared in 1925. This principle is then known as a Political Manifesto of the Indonesian Society (PI). In the manifesto there are still shortcomings, namely the lack of variables that are able to bring unity. Bahasa Indonesia was then examined as a complement of Political Manifesto of PI in the 1925 as the only result of the 1928 Second Youth Congress which has a form and can be researched..

The involvement of the Indonesian language is very rare to be studied as an object that affect the rate of the process of unity until independence, for that reason this research will discuss about. , 1) How the manifesto of the political PI 1925 capable of changing the view point on society of Bumiputra related Dutch colonial?, 2) How is the corelation between the manipol PI 1925 with Indonesian language?, 3) How the Indonesian language could have changed the mindset and behavior of intellectuals in preparation of the Indonesia as a nation?. This research uses a heuristic method, source criticism, interpretation and historiography which is limited to the analysis of the sources that has been obtained in the process of filing a scientific article today. Meanwhile, in this study there are results that in embodiment of unity, Bahasa Indonesia and Pi Political Manifesto are two important factors in the realization of the unity of Indonesian intellectuals.

Keywords :Indonesian Language, Youth Congress in 1928, Political Manifesto of the Indonesian Association in 1925

PENDAHULUAN

Perwujudan persatuan hingga kemerdekaan Indonesia tidak serta merta muncul entah dari mana, melainkan perwujudan tersebut hadir akibat proses yang melibatkan banyak pihak dalam mewujudkannya. Terlebih dalam menciptakan kemerdekaan suatu bangsa tidak mungkin hanya bermodalkan keberanian saja dalam melawan, adapun beberapa faktor penting lainnya seperti pendidikan, strategi taktis, dan pengorbanan yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja dalam mencapai kedaulatan atas bangsa dan negara. Kaum Intelektual di awal abad 20 sudah menyadari bahwa tidak mudah untuk melepaskan belenggu penjajahan yang sudah berlangsung hampir 350 tahun lamanya, perlu adanya strategi perjuangan baru untuk dihadirkan dalam panggung sejarah.

Politik etis pada masa kepemimpinan Gubernur Jendral Alexander WF Idenburg di Hindia Belanda memberikan nafas baru pada masyarakat Bumiputera, adapun tiga aspek dalam Politik etis yakni: Pendidikan, Pengairan, dan perpindahan penduduk. Dalam politik etis terdapat dua bentuk tujuan dalam implementasi atas pendidikan oleh kolonial Belanda kepada masyarakat Bumiputera, *pertama*, pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri dan ekonomi, maka pihak kolonial Belanda memberikan pendidikan dengan mutu tinggi. *Kedua*, diberikannya pendidikan seadanya untuk keperluan tenaga kerja menengah dan rendah. Meskipun dalam kategori pendidikan tidak dapat disamakan, namun kesempatan tersebut yang mengembalikan martabat masyarakat pribumi dengan menghadirkan dialektika sebagai sarana untuk terus memikirkan bagaimana melepaskan belenggu penjajahan.

Kemunculan Organisasi – organisasi kepemudaan yang dipelopori oleh beberapa intelektual muda merupakan jawaban atas pendidikan barat yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, mulai dari terbentuknya Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Soetomo pada tahun 1908 memberikan stimulus akan kesadaran untuk melepaskan belenggu penjajahan oleh Kolonial Belanda. Bermula pada perjuangan yang bersifat kedaerahan pada waktu VOC (*Vereenigde Oost-indische Campagnie*) kini berubah bentuk yang lebih baru, yakni menggunakan pengorganisasian massa untuk memperkuat persatuan berbagai pihak. *Machsvorming*¹ dapat disebut salah satu strategi perjuangan dalam cita – cita kemerdekaan, lahirnya organisasi – organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, *Jong Java*, *Jong SumatranenBond*, PPPI, dll, dengan secara tidak sadar mereka sudah melakukan *Machsvorming*.

Dalam kurun waktu 1925 – 1928 terjadi beberapa peristiwa yang menengarai mulai adanya suatu konsep dan prinsip bersama dalam mewujudkan cita – cita kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia di Belanda mengambil langkah awal dengan menciptakan gagasan

yang kemudian oleh sejarawan Prof. Sartono Kartodirjodi dianggap sebagai manifesto politik karena mempunyai prinsip *unity, liberty, equality* (persatuan, kemerdekaan, persamaan), tidak berhenti disitu, peristiwa Kongres Pemuda II pada tahun 1928 memunculkan beberapa putusan kongres yang kemudian kita kenal sebagai “Sumpah Pemuda”

Kemunculan Bahasa Indonesia yang tercantum dalam resolusi ketiga pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Resolusi tersebut berbunyi “Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean Bahasa Indonesia” memiliki makna lebih ketika dilihat dari sudut pandang dinamika perjuangan masyarakat bumiputera dalam menyongsong kemerdekaan di tahun 1945. Penelitian ini akan menyorot bahasa Indonesia sebagai *trigger* yang sangat penting kepada keberlanjutan perjuangan serta penciptaan identitas bangsa. Terdapat polemik antara kaum intelektual terkait penggunaan bahasa seperti pernyataan Tjipto Mangoenkoesoemo yang menganggap bahwa bahasa Jawa tidak bisa dijadikan bahasa persatuan, melainkan bahasa Belanda yang dapat dijadikan bahasa persatuan karena mampu menuangkan ide – ide modern daripada bahasa Jawa yang terkesan tidak demokratis². Pernyataan Tjipto Mangoenkoesoemo tersebut menjelaskan bahwa bahasa Belanda mendapat tempat tersendiri di kalangan kaum intelektual muda bumiputera dan bukan bahasa ibu ataupun bahasa Indonesia karena pada tahun 1918 pun masih belum ada landasan tentang bahasa Indonesia atau bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia belum ada secara ilmu atau dalam pergaulan sehari – hari. Hingga pada Kongres Pemuda II 1928 tersebut bahasa Indonesia mulai dikenal dan mendapat tempat di dalam sistem keilmuan dan penerapan sehari – hari masyarakat Indonesia.

Seorang pakar linguistik strukturalis, Ferdinand deSaussure menjabarkan pemikirannya tentang bahasa yang memilah antara *parole, langage*, dan *langue*. *Parole* dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi bahasa yang berasal dari tiap pikiran individu dan bersifat subjektif. *Langage*, dapat diartikan sebagai gabungan antara *parole* dengan kaidah bahasa yang ada, dalam hal ini kaidah bahasa yang diterima oleh kaum intelektual muda pada saat itu adalah kaidah – kaidah bahasa yang terdapat dalam proses pembelajaran bahasa Belanda. Sedangkan *langue*, dapat diartikan sebagai kaidah bahasa yang digunakan oleh masyarakat tertentu sehingga memungkinkan untuk masyarakat tersebut paham dan menerima bentuk bahasa tersebut³. *Langue* memberikan konsepsi yang jelas bahwa secara empirik, golongan intelektual muda mendapati perubahan pola pikir dalam hal penggunaan bahasa, penggunaan bahasa ibu dirasa kurang mencukupi hasrat untuk menyongsong era modern karena terkesan kaku, sedangkan bahasa belanda dianggap sebagai jalan yang

¹ Kata *machsvorming* dikenalkan oleh Ir. Soekarno pada buku yang berjudul *Dibawah Bendera Revolusi* jilid 1. Arti kata tersebut sudah diubah maknanya menjadi sebuah strategi politik jangka panjang dalam mengakumulasi massa, pengaruh, pembentukan gagasan dll.

² Tjipto Mangoenkoesomo, “*De Voertaal*,” *De School van Nederlandsch-Indie*, (1918), hlm.274.

³ Saussure, Fd., *Pengantar Linguistik Umum*, trj. Rahayu S. Hidayat, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1996), hlm. 25

membuka pintu pengetahuan barat. Lantas bagaimanakah proses penggantian bahasa Belanda yang sudah memiliki tempat di dalam pikiran serta perasaan kaum intelektual muda dengan bahasa yang sama sekali belum ada?

Manifesto Politik 1925 dicetuskan oleh Perhimpunan Indonesia di Universitas Leiden Belanda tersebut merupakan sinyal awal yang seakan memberikan isyarat bahwa Indonesia harus bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara. Di paruh awal abad 20 merupakan era yang melibatkan banyak sekali aktor penting dalam panggung sejarah nasional dan tidak sedikit pula terjadi konflik horizontal dalam tubuh kelompok antar pemuda tersebut, namun tidak sedikit pula kelompok pemuda yang mau berkompromi satu sama lain dalam menciptakan persatuan. Di dalam manifesto politik 1925 tersirat secara kuat bahwa persatuan merupakan jalan utama yang harus dicapai sebelum melakukan perjuangan lebih lanjut. Bahasa Indonesia yang nantinya dijadikan sebagai bahasa nasional pun mengambil peran penting dalam terciptanya persatuan.

Untuk itu penulis memutuskan untuk memutuskan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana manifesto politik PI 1925 mampu mengubah cara pandang masyarakat Bumiputera terkait penjajahan Belanda?, 2) Bagaimana keterkaitan antara manipol PI 1925 dengan bahasa Indonesia?, 3) Bagaimana bahasa Indonesia dapat mengubah mindset serta perilaku kaum intelektual dalam persiapan berbangsa dan bernegara?. Penelitian terkait bahasa Indonesia yang berhubungan secara tidak langsung dengan manifesto politik PI 1925 diharapkan menjadi jawaban atas munculnya rasa persatuan di kalangan kaum intelektual Indonesia yang muncul dalam simbol manifesto tersebut. Tidak banyak tulisan sejarah yang secara eksplisit menarasikan tentang bagaimana proses penerimaan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu yang menjadi sebuah bahasa Nasional. Tujuan daripada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui dampak manifesto politik PI 1925 dalam pergerakan nasional, 2) Keterkaitan dan persamaan atas konsep manifestasi politik PI 1925 dengan bahasa Indonesia, dan 3) Peranan bahasa Indonesia dalam proses perubahan arah gerakan di Indonesia. Kemudian, hasil penelitian diharapkan mampu untuk menambah wawasan terkait proses yang dialami pemuda dalam mendatangkan konsep persatuan yang dimulai dari terbentuknya manifestasi politik Perhimpunan Indonesia sampai lahirnya bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian Bahasa dalam Perwujudan Manifesto Politik PI tahun 1925-1928 akan menggunakan metode penulisan sejarah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dengan batasan – batasan tertentu, yakni menggunakan kajian analisis sumber sejarah. Tahapan heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber – sumber sejarah yang relevan

dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan. Adapun sumber sejarah primer berupa koran, majalah dan buku sezaman sebagai rujukan utama dalam pembahasan topik artikel. Penemuan sumber primer didapat dari situs daring Belanda yang dapat diakses dengan url “Delpher.nl”. secara berkala situs tersebut mayoritas mengunggah *footage* berupa koran, majalah dan buku Belanda yang terbit pada waktu lampau. Blumberger, Jt. P. 1931. *De Nationalitische Beweging in Nederlandsch Indie*, Isi buku tersebut menceritakan tentang perjalanan pergerakan nasional di Indonesia. Penulisan terkait apa saja yang terjadi pada Perhimpunan Indonesia juga sebagian besar didapat dari buku tersebut. Sumber tersebut memuat tentang perjalanan Perhimpunan Indonesia dari awal hingga dideklarasikannya prinsip organisasi pada tahun 1925. Kemudian beberapa koran dan majalah yang terbit dikurun waktu 1925 – 1954 menjadi sumber primer tambahan dalam mengetahui situasi sosial politik didalam maupun diluar Hindia Belanda seperti tanggapan pemerintah Belanda dalam menanggapi Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 dan Bahasa Indonesia yang di deklarasikan pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928 ataupun propaganda yang dilakukan oleh kaum intelektual Indonesia dalam menyampaikan gagasan – gagasannya di telinga Internasional. Sumber sekunder seperti Saussure, Fd. 1996. *Pengantar Linguistik Umum* menjadi pelengkap dalam melakukan analisis terkait situasi kebahasaan yang dialami oleh kaum intelektual pada saat mulai terpecahnya Politik Bahasa Belanda di Indonesia.

Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah kritik sumber dengan melakukan verifikasi dalam menguji kelayakan sumber yang sudah didapat. namun kritik yang dilakukan hanya sebatas kritik *intern* saja dikarenakan pandemi yang terjadi ketika penulisan artikel ini. Kemudian adalah interpretasi dalam mengambil tindakan analisis terhadap nilai – nilai peristiwa dengan fakta – fakta yang telah dikumpulkan. Dengan selesainya tahap interpretasi diatas maka penulis melanjutkan ke tahap akhir penelitian yakni, proses historiografi, sehingga ide serta gagasan penulis kemudian menjadi sebuah tulisan sejarah sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Kongres pemuda II tahun 1928 dan Manifesto Politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di tahun 1925 merupakan peristiwa yang berbeda. Namun, terdapat seutas rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain ketika dilihat dari alur terjadinya peristiwa tersebut dengan kondisi tanah jajahan Hindia Belanda. Era pergerakan nasional ditandai dengan mulainya kemunculan berbagai organisasi pemuda di awal abad 20 yang tentunya kemunculan organisasi – organisasi tersebut diawali dari implementasi politik etis pada masa Alexander WF Idenburg selaku Gubernur Jendral Hindia Belanda. Pemberian pendidikan untuk beberapa golongan menghantarkan kepada kesadaran bahwa penjajahan di

atas tanah Indonesia harus dihapuskan. Akses pendidikan barat telah memberikan pemahaman bagi golongan muda tersebut akan pentingnya perlawanan untuk mencapai cita – cita kemerdekaan. Landasan prinsip *unity, liberty, dan equality* dalam manipol PI 1925 merupakan simbol perlawanan kepada Belanda yang kemudian disusul dengan rangkaian keputusan Kongres Pemuda II tahun 1928 yang berbunyi;

1. Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mengakoe Bertumpah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia

2. Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia

3. Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Persoalan tentang bahasa merupakan persoalan yang dapat dikatakan sebagai pemersatu segala macam perbedaan yang melekat pada masyarakat Bumiputera dan juga sebagai pada proses pendewasaan politik golongan muda Indonesia yang tengah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh umat Indonesia.

A. MANIFESTO POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA 1925

1. Masa Awal Perhimpunan Indonesia

Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) yang kemudian disingkat dengan “IV” merupakan nama awal sebelum resmi diganti dengan nama Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Bermula pada tahun 1908 dimana mahasiswa keturunan raja dan kaum bangsawan di Hindia Belanda yang menempuh pendidikan di Belanda mendirikan suatu perkumpulan dengan nama *Indische Vereeniging* dengan diprakarsai oleh Sutan Kesayangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto. Menurut Noto Soeroto dalam tulisannya *Bendera Walanda* 1909, mengatakan bahwa tujuan didirikannya *Indische Vereeniging* adalah memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda, kemudian Perhimpunan akan memperkuat hubungan antar orang Hindia di Belanda dan pada akhirnya akan memudahkan dalam menimba ilmu. Meski cenderung konservatif namun, cita – cita yang diungkapkan Noto tersebut lebih menjangkau secara luas tentang perbaikan nasib orang – orang di Hindia Belanda daripada organisasi Budi Utomo yang cakupan tujuannya hanya memajukan Jawa dan Madura saja.

Pada akhir tahun 1913 merupakan tahun penting yang akan mengubah visi sosial-politik para mahasiswa Hindia di Belanda kedepannya. Kedatangan tiga orang yang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan alasan bahwa sosok mereka mungkin akan menghancurkan kestabilan sosial-politik di Hindia Belanda. Pengasingan politik tersebut dialami oleh Douwes Dekker, Soewardi Sorya Ningrat, dan Tjipto Mangunkoesoemo selaku anggota dari *Indischpartij* (IP) yang mana gagasan – gagasan IP tersebut dirasa meresahkan bagi pemerintah Hindia Belanda⁴. Tak

sampai disitu, mahasiswa Hindia yang berada di Belanda semakin lama semakin melonjak ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia 1 dan tidak terbatas pada mahasiswa – mahasiswa keturunan raja dan bangsawan saja yang dapat merasakan pendidikan di Belanda melainkan orang tua yang berlatar belakang birokrat bersama – sama mengirinkan anak – anaknya untuk menimba ilmu di Belanda. Bermula dengan hanya 10 – 20 orang saja di tahun 1908, kini mencapai 150 orang mahasiswa di tahun 1930⁵. Lonjakan jumlah mahasiswa yang sangat besar tersebut pastinya mempengaruhi IV sebagai organisasi yang menampung mahasiswa – mahasiswa Hindia di Belanda, sudut pandang politik yang sebelumnya oleh Noto Soeroto yang menganggap bahwa lebih baik menjalankan politik Asosiasi dengan melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan Belanda kini mulai didinamisasi dengan adanya pandangan politik perlawanan yang muncul ketika IV kedatangan pimpinan – pimpinan IP tersebut.

2. Dinamika Internal Perhimpunan Indonesia

Pada tahun 1922, *Indisch Vereeniging* secara resmi berubah menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia) yang kemudian masih disingkat dengan “IV”. Struktur didalam organisasi IV pun silir berganti hingga pada tahun 1923 lahirlah struktur dengan tingkat visi organisasi yang lebih revolusioner daripada sebelumnya. Tercatat, Iwa Koesoema Sumantri selaku ketua, JB Sitanala selaku Sekretaris, Mohammad Hatta selaku Bendahara, Mr. R. Sastromoeljono selaku komisaris dan TjiptoMangoenkoesoemo selaku badan kearsipan organisasi⁶. Perubahan tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan dipicu oleh dinamika gagasan antara gagasan politik perlawanan dengan politik kompromi. Perbedaan pandangan tersebut dinilai sebagai pembawa perubahan total dalam tubuh organisasi IV sedari awal organisasi tersebut dibentuk, seakan gagasan politik Asosiasi yang dipegang teguh oleh Noto Soeroto dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan mengingat propaganda Indonesia merdeka sudah marak diperbincangkan di kalangan lingkungan mahasiswa. Kemudian, penggunaan kata Indonesia pada nama “*Indonesische Vereeniging*” menggambarkan bahwa tujuan dalam berorganisasi menjadi semakin jelas karena dengan nama Indonesia nantinya akan menjadi satu – satunya rujukan persatuan oleh golongan pemuda Indonesia.

Noto Soeroto didepak dari IV pada tahun 1924 melalui mekanisme persidangan khusus internal organisasi yang dihadiri 50 peserta sidang dengan hasil 45 suara menyetujui Noto Soeroto untuk dikeluarkan dari organisasi dan 5 sisanya menolak. Nazir Pamontjak selaku ketua sidang membacakan hasil putusan sidang dan meminta Noto Soeroto untuk segera keluar dari

⁴ Utama, WS., *Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa: PI dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris*, (Jurnal Sejarah:Vol, 1(2), 2018), hlm. 27-28

⁵ Poeze, Harry., *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Penjajah 1600-1950*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 285

⁶ Blumberger, Jt. P., *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*, (Tjeenk Willink: 1931), hlm. 185

forum⁷. Bukan tanpa alasan seorang Noto Soeroto yang merupakan salah satu pendiri organisasi IV dan pernah menjadi ketua ini di depak keluar oleh koleganya sendiri, alasan digelarnya sidang tersebut dikarenakan Noto Soeroto tetap bersikukuh pada gagasannya tentang politik asosiasi dengan penjajah Belanda di tengah melambungnya gagasan Indonesia Merdeka baik di kalangan mahasiswa Belanda dan di Hindia Belanda. Dinamisasi yang luar biasa tersebut merupakan penanda bahwa propaganda perlawanan terhadap tindakan kolonialisme dan imperialisme sudah semakin marak. Sebagai contoh pemikiran marxis-leninis dan Gandhisme yang juga sudah mencapai telinga mahasiswa Hindia di Belanda meskipun tidak ada anggota IV yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perjuangan yang dilakukan adalah karena perjuangan kelas namun secara terang – terangan mengatakan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan ras.

3. Gagasan Indonesia Merdeka

Politik perlawanan memang merupakan bawaan dari eksil politik IP yang secara langsung mempengaruhi perubahan orientasi di dalam maupun di luar tubuh IV, kemudian diperkuat dengan hadirnya mahasiswa – mahasiswa baru yang memulai pendidikan di Belanda pada pasca berakhirnya Perang Dunia 1. Mahasiswa – mahasiswa baru tersebut mayoritas sedari awal mereka sudah memiliki pengalaman dalam kerja – kerja organisasi di Hindia sebelum bertolak ke Belanda dengan semangat nasionalisme. Pengalaman yang mereka bawa tersebut juga menjadi motivasi yang mendorong terciptanya agenda reorientasi prinsip IV pada masa kepemimpinan Noto Soeroto. Re-orientasi tersebut merupakan titik balik dari berakhirnya perjuangan era tradisional yang masih saja dilanjutkan oleh kelompok – kelompok modern Intelektual yang dimulai dari kelahiran organisasi Budi Utomo. Reorientasi tersebut juga berhasil dalam memotivasi perjuangan di Hindia Belanda, seakan jarak yang begitu jauh tidak menjadi halangan dalam berdialektika tentang gagasan kemerdekaan.

Dalam masa kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri di tahun 1923 dan Nazir Pammoentjak pada 1924, mereka mampu mengikis sedikit demi sedikit budaya lama dengan mempropagandakan istilah *non-cooperation* dan konsep demokrasi yang dipegang sebagai prinsip organisasi. “*Masa depan Indonesia selayaknya dipimpin oleh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas nasib rakyatnya, karena dengan hanya bentuk pemerintahan seperti itu merupakan bentuk pemerintahan yang masuk akal bagi masyarakat Indonesia*”⁸. Prinsip tersebut terus diperbarui seiring dengan bergantinya kepemimpinan di dalam tubuh IV dengan harapan bahwa gagasan yang dicurahkan oleh seluruh anggota dapat menjadi pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Lebih lanjut

prinsip tentang non – kooperasi dan demokrasi, kemudian ditambahkan pula unsur persatuan yang kemudian dimuat pada majalah Hindia Poetra⁹ pada maret 1924.

Pada tahun 1925 *Indonesische Vereeniging* berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) dengan struktur organisasi baru dan prinsip yang baru. Susunan organisasi berubah menjadi seperti berikut; SoekimanWirjosandjojo selaku ketua, A. I. Z. Mononutu selaku wakil ketua, Soerono, selaku Sekretaris 1, Soenarjo selaku Sekretaris 2, Mohammad Hatta selaku Bendahara, Moh Mazif selaku Bendahara 2, Amir, Budiarto dan Moh Yusuf selaku Komisaris. Kemudian prinsip organisasi juga diubah dengan nuansa yang lebih progresif revolusioner, yang kemudian dideklarasikan melewati media surat kabar Hindia Poetra yang pada tahun 1924 telah berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. PI pun mendeklarasikan prinsip – prinsipnya yang berisi; 1). Indonesia bersatu dan mengesampingkan perbedaan golongan maka dapat dipastikan akan mematahkan dominasi kekuasaan dengan massa aksi nasional yang sadar dan mandiri. 2). Partisipasi seluruh rakyat Indonesia menjadi syarat yang mutlak agar terwujudnya tujuan tersebut. 3). Unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah politik kolonial adalah konflik kepentingan antara penguasa dengan yang dikuasai, konflik tersebut harus dijawab oleh pihak yang didominasi dengan penajaman proses berpikir. 4). Pengaruh dominasi yang merusak dan melemahkan moral terhadap kondisi fisik serta psikis masyarakat Indonesia, untuk itu diperlukan upaya dan program kerja yang kuat dalam mengatasi kondisi tersebut¹⁰. Program kerja tersebut berfokus pada kegiatan agitasi propaganda yang bertujuan menyebarkan prinsip – prinsip PI khususnya di Indonesia dan juga mempropagandakan kondisi yang ada di Indonesia kepada dunia Internasional, adapun beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh anggota – anggotanya seperti melakukan perkuliahan umum, perjalanan study dll.

Melalui prinsip – prinsip yang dimuat pada majalah Indonesia Merdeka tersebut, Prof. Sartono Kartodirdjo mengutarakan pendapatnya dalam sesi wawancara yang dimuat pada majalah *Baliurang Nomor 25 Tahun 1997*, beliau mengutarakan bahwa prinsip – prinsip yang dideklarasikan oleh PI tersebut bukan sekedar prinsip, melainkan sebuah manifesto politik karena didalamnya memuat unsur *unity, liberty, dan equality*¹¹. Keberadaan prinsip yang fundamental tersebut mendorong terjadinya babak baru dalam agenda perjuangan yang nantinya akan sampai kepada digelarnya kongres pemuda II pada tahun 1928. Dalam konteks perbedaan organisasi - organisasi pergerakan nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang secara fleksibel menyikapi segala bentuk perubahan dinamika politik yang terjadi di tanah

⁷ Hatta, *Untuk Negriku: Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 222

⁸ Blumberger, J. Tp., *Op. Cit.*, hlm. 186-185

⁹ Merupakan Majalah keluaran *Indonesische Vereeniging*.

¹⁰ Blumberger, J. Tp., *Op. Cit.*, hlm. 188-189

¹¹ Kartodirdjo, S., *Manifesto Politik Pemuda Banyak Dilupakan*, (Baliurang: No. 25. Tahun 1997)

air jika dilihat dari pengambilan sikap politiknya dari tahun ke tahun. Kehadiran pengaruh atas tumbuh kembangnya arus pergerakan di Hindia juga menjadi salah satu alasan dalam perubahan sikap – sikap politik yang dijalankan oleh Perhimpunan Indonesia. Bisa diartikan bahwa Perhimpunan Indonesia di Belanda tersebut merupakan Organisasi yang dapat dijadikan sebagai Organisasi pelopor perkembangan pergerakan nasional Indonesia.

B. KEPUTUSAN KONGRES PEMUDA II TENTANG BAHASA

1. Kondisi Pergerakan Pemuda di Hindia

Pergerakan Nasional di Hindia ditengarai dengan berdirinya organisasi pelajar Budi Utomo oleh perkumpulan pelajar STOVIA dan dipimpin oleh R. Soetomo pada 20 Mei 1908 yang sampai saat ini kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Dikarenakan beberapa polemik yang terjadi maka para pemuda yang tergabung dalam Budi Utomo sepakat untuk membuat organisasi dengan semangat kedaerahan pemuda Jawa dengan nama Tri Koro Dharmo pada 7 maret 1915. Tri Koro Dharmomerubah namanya pada tahun 1918 menjadi *Jong Java*, disusul dengan organisasi kedaerahan lain seperti *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Bataks Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, *Timoresche Jongeren Bond*¹². Kemudian Kongres Pemuda pertama yang digelar pada 30 April – 2 Mei 1926 masih belum menghasilkan suatu kesepakatan bersama, hanya saja para pemuda dari masing – masing kelompok tersebut mengutarakan pandangan serta gagasan mereka masing – masing. Meskipun masih belum menemukan kesepakatan apapun, peristiwa Kongres Pemuda pertama yang diketuai oleh M. Tabrani tersebut menandakan bahwa para pemuda Indonesia sudah selangkah dalam mencapai persatuan.

Sedangkan di Belanda, Perhimpunan Indonesia menyepakati bahwa akan mendatangi kongres anti imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang digelar di Brussel tahun 1927, dengan mayoritas peserta kongres pada waktu itu berasal dari negara – negara yang masih terjajah. Bung Hatta, Nazir Pamoentjak, Ahmad Soebardjo, Gatot Tarumihardjo, dan Abdul Manaf dipilih menjadi delegasi Perhimpunan Indonesia. Pada penutupan Kongres Internasional tersebut, Hatta selaku delegasi dari PI menjelaskan tentang mosi yang menuduh pemerintah Belanda di Hindia Belanda melakukan praktik imperialisme, kemudian disusul dengan tuntutan untuk; (a). memberikan kebebasan dalam melakukan pergerakan di Hindia Belanda, (b). Penentuan nasib sendiri oleh bangsa Indonesia, (c). Pencabutan dekrit tentang pengasingan, dan (d). Pemberian amnesti umum. Dalam pidatonya tersebut, Moh. Hatta menggunakan judul *Indonesia Vrij*

(Indonesia merdeka)¹³. Kelompok pemuda yang berada di Indonesia maupun di Belanda memiliki peranannya masing – masing dengan tujuan memperkuat akar perlawanan serta mencari modal pengalaman dalam penerapan strategi perjuangan.

2. Dinamika Kongres Pemuda II

Dua tahun setelah Kongres Pemuda pertama, pada 28 Oktober 1928 dimulailah lagi kerapatan umum pemuda Indonesia dengan nama Kongres Pemuda II. Soegondodjojopuspito yang merupakan salah satu anggota dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia menjadi ketua sidang Kongres tersebut. Pada Kongres Pemuda II kali ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antar organisasi – organisasi pemuda, maka dengan siap M. Yamin sebagai sekretaris dan merupakan perwakilan dari *Jong Sumatranen Bond* sudah menyiapkan 3 resolusi yang nantinya akan disepakati sebagai keputusan kongres. Perlu diketahui bahwa pada Kongres Pemuda I masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar namun, pada persidangan Kongres Pemuda II kali ini sudah menggunakan bahasa Melayu – Indonesia meski tidak semua anggota menjalankan proses persidangan mampu mengerti dan menggunakannya¹⁴. Dengan kemajuan yang begitu mengagumkan, Kongres Pemuda Indonesia ditutup dengan 3 resolusi yang sudah diracik oleh M. Yamin tersebut sebagai kesepakatan bersama. Klausul bertanah air Indonesia, berbangsa satu Indonesia dan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia menandakan bahwa persatuan secara tertulis sudah dicapai oleh pemuda Indonesia. Keputusan Kongres tersebut seakan menjadi jawaban atas semangat yang dibawa oleh Perhimpunan Indonesia pada prinsip yang sudah lebih dulu mereka deklarasikan pada 1925 sehingga secara tidak langsung kedua peristiwa tersebut saling berkaitan satu sama lain mengingat cita – cita mereka sama – sama ingin menuju Indonesia merdeka.

Kesamaan antara golongan pemuda ini adalah kesamaan dalam mengenyang pendidikan Belanda dan kesamaan dalam merasakan pengaruh masuknya budaya barat¹⁵. Selain itu mereka juga sama – sama menggunakan Bahasa Belanda selain bahasa daerah mereka dalam kehidupan sehari – hari. *Parole* dalam kajian ilmu *Linguistik* Strukturalis Ferdinand deSaussure membuktikan bahwa perilaku dalam berbahasa Belanda sudah mendominasi semua golongan muda yang merasakan pendidikan Belanda. Secara jelas Soekarno mengungkapkan seberapa dekat para pemuda dengan bahasa Belanda, “Bahasa Belanda menjadi Bahasa yang kugunakan ketika aku berpikir, bahkan ketika aku mengutuk Belanda, aku berdoa

¹² Sudiyo, dkk., *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai Pengakuan Kedaulatan*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 48

¹³ Tegen Koloniale Onderdrukking, *Provinciale Noordbrabantscheen's Hertogenbosche Courant*, (Hertogenbosch. 15 maart 1927)

¹⁴ Foulcher, K., *Sumpah Pemuda: The Making and Meaning of a Symbol of Indonesian Nationhood*. (Asian Studies Review: Vol. 24 No. 3. September 2000), hlm. 380

¹⁵ Anderson, B., *Imagined Community: Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, (London: Verso, 1991), hlm 121

menggunakan bahasa Belanda”¹⁶. Dimensi berpikir golongan pemuda tersebut lambat laun akan digantikan dengan serba Indonesia, baik dalam berperilaku, dalam granddesign perjuangan dan bahasa Indonesia sebagai budaya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang secara resmi dideklarasikan sebagai bahasa perjuangan sekaligus bahasa nasional pada kalimat “Kami Putra Putri Indonesia Menjunjung Tinggi Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia” yang termuat dalam salah satu resolusi Kongres Pemuda II. Mr. M. Yamin dalam Kongres Pemuda I mengutarakan gagasan bahwa bahasa melayu berkesempatan dapat memperkaya budaya bangsa serta berpotensi dijadikan bahasa nasional mengingat *Lingua Franca* (bahasa serumpun) di Indonesia adalah bahasa Melayu. namun dengan semangat nasionalisme yang tinggi, M. Tabrani dan Sanusi Pane berpendapat bahwa seharusnya kita memakai bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga merupakan bentuk keputusan yang mempertimbangkan bahwa bahasa Melayu merupakan salah satu *Lingua Franca* di Asia Tenggara dan disebabkan oleh politik bahasa Belanda yang tidak didukung untuk disebarluaskan kepada orang – orang diluar Belanda¹⁷. Memang secara penerapan Bahasa Belanda, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja sehingga tidak mungkin bahasa Belanda dijadikan bahasa pergaulan oleh masyarakat Bumiputera

C. BAHASA INDONESIA SEBAGAI PELENGKAP DALAM MANIFESTO POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA 1925

1. Letak Bahasa Indonesia dalam Konteks Perjuangan.

Penemuan kata “Indonesia” mulai ditulis secara ilmiah oleh James Richardson Logan dan George Samuel WindsorEarl pada majalah ilmiah yang berjudul *Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA) pada tahun 1850 yang kemudian di populerkan oleh seorang etnolog asal Jerman, Adolf Bastian yang dijelaskan dalam buku *Die Volkev des Ostl Asien* (1884). Pengadopsian kata tersebut mempunyai makna politis ketika melihat pergerakan pemuda di tanah jajahan Hindia dan di Belanda, karena dengan mempropagandakan nama Indonesia seakan mengikis fragmentasi dalam pola gerakan sosial politik di era pergerakan nasional. Seperti halnya pemakaian kata Indonesia pada perubahan nama *Indisch Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia atau wadah bersama yang dibuat oleh kelompok – kelompok pemuda di Hindia yang dinamai Perhimpunan Pelajar – Pelajar Indonesia (PPPI), menjadikan “Indonesia” bukan hanya sekedar kata yang ditemukan untuk penamaan sebuah wilayah kepulauan di Asia Tenggara saja, melainkan penamaan tersebut memiliki makna politis dalam upaya

pemuda untuk berusaha melahirkan suatu gerakan persatuan¹⁸.

Indonesia diadopsi sebagai penamaan atas bahasa nasional yang secara resmi diputuskan oleh perkumpulan – perkumpulan pemuda dalam Kongres Pemuda II, pada 28 Oktober 1928. Tokoh sentral yang secara aktif mempengaruhi keputusan bersama tersebut adalah M. Yamin, M. Tabrani, Sanusi Pane dan SoegondoDjojopoespito. Keempat tokoh tersebut masing – masing menjadi pengurus kongres pemuda II. Resolusi ke – 3 dari 3 resolusi yang dihasilkan adalah pernyataan tentang menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Pada Kongres pemuda I, M. Yamin menyampaikan gagasan tentang “Hari depan Bahasa – Bahasa Indonesia dan Kesusastraannya”, M. Yamin juga mengatakan bahwa “Kebudayaan Indonesia akan diutarakan dengan Bahasa Melayu di masa mendatang¹⁹. Keinginan M. Yamin tersebut berubah menjadi Bahasa Indonesia atas pertimbangan yang disampaikan M. Tabrani dan Sanusi Pane ketika putusan kongres tersebut masih berupa rumusan yang akan disampaikan pada Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia memulai perjalanannya bukan sebagai kebudayaan, melainkan secara subyektif pemikiran pemuda adalah sebagai alat politik dalam melegitimasi bahwa akan ada suatu bangsa yang kelak akan berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak manapun.

Dengan dideklarasikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka secara tidak langsung bahasa Indonesia akan menggantikan *parole* dalam pikiran dan sikap Pemuda yang sebelumnya didominasi oleh Bahasa Belanda. Bahasa Indonesia mendapat tanggapan yang serius oleh pihak Belanda jika dilihat dari surat kabar yang dimuat oleh salah satu surat kabar di Rotterdam. Surat kabar tersebut menuliskan tentang mulai terkikisnya fragmentasi dari beberapa perkumpulan di Indonesia dikarenakan populernya ide persatuan. Lebih lanjut, pada waktu itu kelompok – kelompok pemuda tersebut tengah sibuk dengan agenda penentuan bahasa Nasional yang kemudian dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bukan Bahasa Belanda, seakan Bahasa Belanda dilupakan begitu saja, padahal sudah berjasa dalam memperkenalkan pendidikan barat di Indonesia²⁰. Surat kabar tersebut secara jelas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia secara sukses mendapat perhatian khusus oleh pihak Belanda, sekaligus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan yang membungkus segala macam konsep dan prinsip yang telah dirumuskan oleh berbagai kelompok pemuda Indonesia, terutama sebagai jawaban atas MANIPOL Perhimpunan Indonesia 1925.

¹⁶ Soekarno, *An Autobiography as Told to Cindy Adams*, (New York: 1965), hlm. 67

¹⁷ Groeneboer, K., *Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda*, Wacana. Vol. 1. No. 1. 1999, hlm. 32

¹⁸ Sudiyo, dkk., *Loc. Cit.*, hlm. 49

¹⁹ Tabrani, M., 1979. *Anak Nakal banyak Akal*. (Bandung: Aqua Press), hlm. 34

²⁰ *Nieuwe Rotterdamsche Courant, Kroniek*, (Rotterdam: 1928)

2. Bahasa Indonesia Sebagai pelengkap atas kurangnya sebuah simbol persatuan dalam Manifesto Politik PI 1925

Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 didapat dari sebuah prinsip organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dideklarasikan pada tahun 1925 lewat majalah organisasi bernama Indonesia Merdeka. Namun pada tahun – tahun setelah dideklarasikan, belum diketahui dengan pasti implementasi prinsip – prinsip tersebut berbentuk apa dan bagaimana. Memang prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai konsepsi yang mengawali era persatuan kaum Intelektual Indonesia, karena dengan keberaniannya, Perhimpunan Indonesia mampu merumuskan prinsip universal yang seharusnya mampu menggiring Indonesia pada persatuan ketika prinsip tersebut dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenyataannya, jika harus dikoreksi di dalam manifesto tersebut masih kurang adanya simbol yang memudahkan kaum Intelektual dalam menyingkirkan sentimen kedaerahan. Menurut Ernst Cassirer, manusia merupakan makhluk yang menciptakan simbol dan menggunakan simbol didalam kehidupannya. terlepas dari segi politik, budaya, maupun ekonomi, manusia menggunakan simbol – simbol dalam menerjemahkan atau mendefinisikan sesuatu. Lebih lanjut, ia mengatakan tentang manusia dan alam merupakan suatu realitas yang mana realitas yang ditangkap akan bertransformasi sebagai pengalaman. Dalam pengalaman terdiri dari *matter* (bahan – bahan) yang membentuk *form* (bentuk). *Form* membentuk simbol yang menciptakan kebudayaan dan *form* dalam kebudayaan tersebut membentuk bahasa, mitos, religi, seni, dan ilmu pengetahuan²¹. Bahasa merupakan aset kebudayaan akibat dari keberadaan manusia yang menciptakan sistem bahasa dalam kegiatan berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa dapat dikatakan sebagai media penyimpanan suatu kekuatan yang dapat digunakan dalam berjuang melawan kolonialisme Belanda. Bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai simbol perjuangan yang dapat melengkapi atas kekurangan dari penciptaan simbol didalam Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925.

Di tahun munculnya gagasan tentang bahasa nasional pada 1926 – 1928, Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sama sekali bukan bahasa ilmiah, karena bahasa tersebut merupakan bahasa yang hanya diklaim dengan tujuan untuk menunjukkan identitas suatu bangsa. Penciptaan simbol Bahasa Indonesia merupakan langkah tepat yang diambil sehingga beriringan dengan propaganda oleh PI dalam menyebar luaskan prinsip serta program kerja yang akan dilakukan oleh PI. Sebagai bahasa yang diciptakan atas dasar persatuan, Bahasa Indonesia menempuh tahun – tahun yang cukup sulit dalam pembuktiannya sebagai bahasa nasional dan sebagai budaya. Rintangan yang jelas menghambat di

depan adalah ketika bahasa Indonesia diragukan oleh orang lain, baik dalam keinginan para pemuda untuk meninggalkan bahasa Belanda ataupun kemampuan para pemuda dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ilmiah. Anggapan atas ketidakmampuan pemuda Indonesia dalam meninggalkan bahasa sudah tersebar bahkan sebelum Kongres Pemuda II. Pada 20 Maret 1928, dikabarkan bahwa telah terjadi perkumpulan besar yang mana ada seorang dari ras Jawa yang membuka pidatonya dengan bahasa Melayu, namun ia melanjutkan pidatonya dalam bahasa Belanda di pertengahan pidatonya²². Rasa ketidakpercayaan yang ditulis dalam surat kabar tersebut memang ada benarnya, karena sampai saat itu, tiap suku di Hindia Belanda hanya ada bahasa Belanda dan bahasa daerah yang dipergunakan sehari – hari. Tidak ada yang menyangka bahwa kelak di tahun yang sama pada bulan Oktober akan ada sebuah bahasa yang dipertaruhkan dalam upaya menggantikan dominasi bahasa Belanda di Hindia Belanda. Dalam praktiknya, Bahasa Indonesia juga mulai digunakan pasca Kongres Pemuda II karena dalam Kerapatan Pemuda tersebut juga memuat tentang ajakan untuk mengadopsi resolusi Kongres Pemuda II sebagai prinsip organisasi – organisasi nasionalis Indonesia²³.

Sebagai awal perwujudan dari persatuan Indonesia pasca lahirnya Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 dan Kongres Pemuda II 1928 tersebut, beberapa kelompok pemuda berhasil melakukan fusi organisasi pada awal Desember 1929. Kelompok pemuda yang terdiri dari *Jong Java*, Pemuda Indonesia, dan Pemuda Sumatra bersepakat untuk bersatu dan membentuk organisasi yang bernama Indonesia Muda. Tujuan daripada dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang bermacam – macam dan sekaligus mengenalkan bahasa Indonesia sebagai budaya asli Indonesia²⁴. Selain agar terciptanya rasa saling memiliki atas berbagai macam budaya di Indonesia, organisasi Indonesia Muda juga dibentuk atas dasar semangat dalam menjawab segala keraguan atas diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Fusi tersebut tidak akan terjadi jika bahasa Indonesia didalam keputusan Kongres Pemuda II tidak dipropagandakan secara terus menerus. Sebelum terciptanya kesepakatan tentang bahasa Indonesia, masyarakat hanya mengenal bahasa Melayu karena bahasa tersebut adalah bahasa serumpun. Fakta yang ada pada tahun 1916 ketika Suwardi Suryaningrat mengutarakan tentang pembelaannya terhadap bahasa Melayu harus diajarkan sebagai bahasa asing dalam seluruh pendidikan serta pada *ELS (Europeesche Lagere School)* agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Persatuan di Nusantara karena bahasa ini lebih

²¹ Cassirer, E., *The Philosophy of Symbolic Forms Vol. 1 Language*, Terjemahan Ralph Manheim, (New Haven: Yale University Press, 1953), hlm. 10

²² De Indische Courant, „BAHASA INDONESIA“, Een eenheidstall, (Soerabaia: [s.n.]. 20-03-1928).

²³ Nieuwe Rotterdamsche Courant, *Voor de Nationale Eenhele*, (Rotterdam: 20-12-1928)

²⁴ De Indische Courant, *Indonesia Moeda*, (Soerabaia: [s.n.]. 03-12-1929)

sederhana dan demokratis daripada bahasa Jawa. Tentu saja pendapat tersebut menuai tanggapan yang negatif di kalangan Nasionalis Jawa, karena dianggap sebagai penindasan atas bahasa dan orang – orang Jawa²⁵. Pernyataan Ki Hadjar Dewantoro tersebut mungkin terlalu dini untuk diucapkan karena pada tahun 1916 sentimen kedaerahan masih sangat kuat dikalangan pemuda. Lantas, apa yang mengubah pemuda Indonesia yang menerima upaya menasionalkan suatu bahasa yang bahkan belum ada sebelumnya ditahun 1928? (Bahasa Indonesia). Tentu saja itu adalah akibat dari proses perjuangan kelompok – kelompok yang menginginkan persatuan seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Perhimpunan Indonesia dengan prinsip – prinsipnya yang selama ini kita kenal sebagai Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia turut andil dalam meluluhkan egosentris kedaerahan yang begitu kuat pada medio waktu 1990 – 1928. Selebihnya, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan para pejuang dalam pengambilan keputusan bersama atas bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, melainkan pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu pertarungan yang bahkan para pejuang sekalipun tidak dapat memprediksi bahwa bahasa tersebut mampu atau tidak untuk mengikis dominasi bahasa Belanda yang selama 350 tahun telah menjajah Indonesia. Dalam isi pidato R.M. Pandji Sosro Kartono yang berjudul *Het Nederlands in Indie* (Bahasa Belanda di Hindia Belanda) pada tahun Agustus 1899 di Gent (Belgia), menunjukkan tentang rasa terima kasih atas diberikannya pendidikan bahasa Belanda, karena dengan mengerti bahasa Belanda banyak sekali manfaat seperti pemahaman atas pendidikan yang berkembang di barat, kemudian disusul dengan pernyataan tentang potensi bahasa Belanda yang akan menggantikan bahasa – bahasa di sekitar Asia Tenggara²⁶.

Melihat pada realitas yang terjadi pada 30 tahun setelah R. M. Pandji Sosro Kartono berbicara di hadapan peserta kongres, kemunculan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pemerataan terhadap propaganda politik bahasa Belanda. Nasionalisme mulai dibangun karena ketidakpuasan atas politik etis yang pada dasarnya bertujuan untuk memajukan tanah jajahan di Hindia Belanda. Meski Pada tahun – tahun pertama implementasi politik etis diawali dengan kekaguman terhadap bahasa Belanda, namun jika disusul dengan tidak adanya pemerataan di tahun – tahun berikutnya maka sama saja dengan bangsa Belanda yang memajukan pendidikan di Indonesia untuk kemerdekaannya sendiri. Bahasa persatuan Indonesia memang diciptakan dengan maksud pragmatis politik untuk kepentingan dalam menciptakan persatuan, namun juga secara efektif menciptakan gelombang pergantian dominasi politik bahasa Belanda

di Hindia Belanda²⁷. Perlunya sebuah bahasa persatuan adalah agar terciptanya suatu disiplin gerakan yang bergerak selain secara politik namun juga secara kebudayaan. Kebudayaan tersebut menjadi pelengkap dalam persiapan – persiapan yang dilakukan oleh pemuda untuk membentuk suatu bangsa dan negara mandiri. Sebagai tambahan, Bahasa merupakan sumber dari seluruh aktivitas Intelektual manusia, yang menunjukkan cara baru untuk memimpin secara terus – menerus kepada konsep baru atas dunia objektif. Bahasa juga merupakan ekspresi individual yang memerlukan persatuan dan pengalaman yang secara sistematis sehingga melahirkan bahasa ilmiah, yaitu bahasa logika. Untuk itu simbolisme bahasa bukan hanya ada dalam ranah semantik namun juga simbol estetika²⁸. Awal penciptaan Bahasa Indonesia merupakan upaya klaim atas suatu bahasa nasional yang dihadirkan untuk mempertegas bentuk keinginan dari cita – cita dalam menciptakan negara baru tanpa penjajahan oleh kaum intelektual Indonesia. Harapan dari diciptakannya bahasa persatuan tersebut adalah merubah logika berpikir yang awalnya Indonesia ada karena Belanda menjadi Indonesia ada karena sadar atas kolonialisme Belanda dan ingin melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dalam Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 dapat ditarik benang tipis yang menghubungkan terciptanya Manifesto tersebut dengan kelahiran Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berawal dari kekurangan atas variabel simbol perwujudan persatuan didalamnya. Kongres Pemuda II 1928 menghadirkan perwujudan atas simbol persatuan tersebut yakni dengan menyepakati Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena Bahasa Indonesia merupakan poin penting atas hasil yang mempunyai wujud konkrit daripada hanya menyatakan bersatu karena tanah air dan berbangsa Indonesia. Dalam Manifesto Politik 1925 menyinggung perihal persatuan, kesamaan dan kemerdekaan sebagai poin penting dalam melakukan perjuangan, Bahasa Indonesia pun juga demikian. Tujuan diciptakannya bahasa Indonesia adalah agar rakyat mampu bersatu di bawah satu simbol untuk mengikis dominannya budaya Belanda, terutama politik Bahasa Belanda. Lebih lanjut, Bahasa Indonesia juga berperan menjadi media persamaan sehingga kehadirannya diharapkan mampu mengikis sentimen kedaerahan. Persamaan yang dituju oleh prinsip Perhimpunan Indonesia tersebut adalah persamaan yang menghilangkan sentimen antar golongan, maka Bahasa Indonesia juga termasuk aktif dalam mewujudkan prinsip tersebut. Terakhir, prinsip tentang kemerdekaan menggambarkan lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan, hingga Bahasa Indonesia hadir sebagai perwujudan atas bahasa kebebasan dan juga berperan dalam sedikit demi sedikit menghancurkan dominasi *parole* Bahasa Belanda yang berjasa dalam membukakan pintu gerbang pendidikan barat.

²⁵ Surya Ningrat, S., *Welke Plaats Behooren Bij Het Onderwijs In Te Nemen Eendeels De Inheemsche Talen, Ook Het Chineesch en Arabisch, Anderdeels Het Nederlandsch?*, dalam *Prae-adviezen Van Het Eerste Kolonial Onderwijscongres*, (Gravenhage: Korthius, 1916)

²⁶ *Nederlandsch Staatcourant, Verslag over het Gent gehouden XXVste Taalen Letterkundig Congres*, (Den Hag: Bureau der Nederlandsche Staats-courant. 1899)

²⁷ Groeneboer, K., *Loc. Cit.*, hlm. 44-45

²⁸ Cassirer, E., *Symbol, Myth, and Culture*, (New Haven: Yale University Press, 1979), hlm. 182-184

Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas Bahasa Indonesia sebagai pelengkap atas kurangnya simbol yang dapat mendatangkan persatuan didalam Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925.

Kesuksesan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional, tidak akan terjadi jika Belanda benar – benar menerapkan politik etis sebagai kebijakan politik yang benar – benar dilakukan atas dasar tanggung jawab kepada Hindia Belanda. Seperti yang sudah dituliskan pada paragraf – paragraf sebelumnya, terkait ketidak jelasan politik bahasa Belanda di Hindia Belanda yang merupakan alasan terpenting mengapa kaum intelektual Indonesia ingin meninggalkan bahasa Belanda dan juga ingin merdeka. Bosquet menggambarkan bahwa Kebijakan kolonial Belanda tidak pernah barang sekali saja memperhatikan bahwa Bahasa Belanda dapat memainkan peran dalam memberikan kebudayaan serta peradaban kepada penduduk asli²⁹. Selebihnya ia mengutarakan tentang yang harus disalahkan atas dipilihnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bangsa Belanda sendiri. Perasaan untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi pun hadir di di tahun 1941 dengan dikeluarkannya kebijakan ganda oleh pemerintah Kolonial Belanda yang menyatakan bahwa bahasa Melayu dan Bahasa Belanda mempunyai peredikat serta posisi yang sama dengan prinsip bahwa pengantar pendidikan menggunakan bahasa daerah, kemudian bahasa melayu sebagai bahasa yang menopang persatuan di Nusantara dan bahasa Belanda sebagai penopang hubungan eksternal dengan dunia barat. Hadirlah bahasa Melayu sebagai bahasa wajib pada Sekolah Menengah Pertama (MULO) dan pada sekolah dagang karena keperluan perluasan pengaruh bahasa Indonesia dalam bahasa dagang, pemerintahan, hukum, dan persatuan. Namun hal tersebut tak bertahan lama karena Jepang setahun kemudian hadir di Indonesia sebagai penjajah baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Manifesto Politik 1925 adalah pasal – pasal tentang prinsip organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dideklarasikan pada tahun 1925 merupakan sebuah pernyataan awal tentang dimulainya babak baru dalam perkembangan perjuangan melawan Belanda. Babak baru tersebut adalah perlawanan yang digelorakan secara masif dan terorganisir, sebab pada intinya prinsip – prinsip yang dipropagandakan tersebut adalah pernyataan perlawanan yang tegas sekaligus isyarat untuk Indonesia agar segera bersatu. Isyarat tersebut kemudian sampai ke telinga kelompok – kelompok pemuda di Indonesia. Prinsip tentang Persatuan, Persamaan dan Kemerdekaan telah tersusun dengan rapi oleh Perhimpunan Indonesia, dengan modal prinsip tersebut maka kebingungan dalam perjuangan segera terluruskan karena adanya pedoman yang mampu menutupi keterbatasan – keterbatasan keperluan perjuangan. Prinsip tersebut juga memberikan pedoman

arah gerak perjuangan golongan – golongan intelektual yang berada di Hindia Belanda sebab propaganda – propaganda yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia juga sangat masif dilakukan. Seperti halnya PI yang membacakan mosi atas tuntutan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda pada Kongres Internasional di Belgia.

Stimulus yang disuntikkan oleh PI kepada masyarakat Bumiputera tersebut terbukti memotivasi kaum Intelektual ditandai dengan dilaksanakannya Kongres Pemuda I dan II. Perumusan resolusi oleh M. Yamin, M. Tabrani, dan Sanusi Pane melahirkan Bahasa Indonesia sebagai variabel yang membungkus seluruh Manifesto Politik 1925. Bahasa Indonesia menunjukkan *impact* yang sungguh masif dalam kemajuan di era pergerakan nasional. berawal dari bahasa yang hanya bermakna sebagai alat politik saja , hingga sampailah pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Keterkaitan antara manifesto politik 1925 dengan bahasa bisa didapat:

1. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa
2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengikis dominannya bahasa Belanda
3. Bahasa Indonesia sebagai alat persamaan sehingga menghasilkan rasa egaliter bagi seluruh rakyat Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah juga merupakan perjuangan yang melelahkan karena berawal dari keberadaan yang kosong. Secara budaya, bahasa Indonesia belum menghasilkan kesusastraan apapun sehingga belum bisa membuktikan bahwa ada bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Tidak ada satupun tulisan – tulisan Ilmiah yang juga sebagai dalih pembuktian bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang ilmiah dan dapat digunakan untuk menerjemahkan ungkapan – ungkapan ilmu pengetahuan. Faktor tersebut membuat Belanda menganggap remeh bahwa bahasa Indonesia tidak akan mampu menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari – hari, karena pada dasarnya penerjemahan ungkapan – ungkapan ilmiah juga sangat terbatas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan digelarnya Kongres Bahasa Indonesia menjadi peringatan bahwa Indonesia secara mandiri mampu membentuk budaya asli sebagai warisan bangsa bernama Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Surat Kabar, Majalah lama

- De Indische Courant. *Indonesia Moeda*. Soerabaia: [s.n.]. 03-12-1929
- Het Harpool. *Aanvaarding Leerstoel Bahasa Indonesia*. Amsterdam: 24-04-1951.
- Mangoenkoesomo, T. 1918. “*DeVoertaal*,” *De School van Nederlandsch-Indië*.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant. *Kroniek*. (Rotterdam: 1928)
- Nieuwe Rotterdamsche Courant. *Voor de Nationale Eenhele*, (Rotterdam: 20-12-1928)

²⁹ Bosquet, G. H., *A French View of the Netherlands Indies*, (London: Oxford University Press, 1940), hlm. 89

- Nederlandsch Staatcourant. *Verslag over het Gentgehouden XXVste Taalen Letterkundig Congres. Den Hag: Bureau der Nederlandsche Staats-courant.* 1899.
- Surya Ningrat, S. 1916. *Welke Plaats Behooren Bij Het Onderwijs In Te Nemen Eendeels De Inheemsche Talen, Ook Het Chineesch en Arabisch, Anderdeels Het Nederlandsch?.* dalam Prae-adviezen Van Het Eerste Kolonial Onderwijscongres. (Gravenhage: Korthius, 1916)
- Tegen Koloniale Onderdrukking. *Provinciale Noordbrabantscheen's Hertogenbossche Courant.* Hertogenbosch. 15 maart 1927
- Prakemerdekaan.* Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 3. No. 2. Desember 2018.
- Sudiyo, dkk. 1997. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai Pengakuan Kedaulatan.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Tabrani, M. 1979. *Anak Nakal banyak Akal.* Bandung: Aqua Press.
- Utama, WS. 2018. *Mempropagandaan Kemerdekaan di Eropa: Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris.* Jurnal Sejarah. Vol. 1(2). 2018: 25 – 45

Sumber Buku, Surat Kabar & Jurnal

- Adam, AW. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah; Kontroversi Pelaku dan peristiwa.* Jakarta: Kompas.
- Anderson, B. 1991. *Imagined Comunity: Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme.* London: Verso
- Blumberger, J.Th. 1931. *De Nationalistische Beweging in Nedelandsch-Indië: Tjeenk Willink.*
- Bosquet, G. H. 1940. *A French View of the Nederlands Indies.* London: Oxford University Press.
- Cassier, E. 1953. *The Philosophy of Symbolic Forms Vol. 1 Language.* Terjemahan Ralph Manheim. New Haven: Yale University Press.
- Foulcher, K. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia.* Depok: Komunitas Bambu.
- Groeneboer, K. 1995. *Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië 1600 – 1950. Een Taal politieke geschiedenis.* Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Hatta. 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi.* Jakarta: Kompas.
- Kartodirdjo, S. *Manifesto Politik Pemuda Banyak Dilupakan.* Baliurang: No. 25. Tahun 1997
- Kartodirdjo, S. 2005. *Sejak Indische Sampai Indonesia.* Jakarta: Kompas.
- Perhimpunan Indonesia. *30 Jaar Perhimpunan Indonesia 1908-1938.* Perhimpunan Indonesia: 1938
- Poeze, Harry. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Penjajah 1600-1950.* Jakarta: Gramedia
- Saussure, F. 1996. *Pengantar Linguistik Umum.* Trj. Rahayu S. Hidayat. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Soekarno. 1965. *An Autobiography as Toldto Cindy Adams.* New York. (k). Perhimpunan Indonesia. *30 Jaar Perhimpunan Indonesia 1908-1938.* Perhimpunan Indonesia: 1938.
- Soekarno. 2019. *Dibawah Bendera Revolusi.* Jakarta: Yayasan Bung Karno, Edisi Cetakan ke-2.
- Sudaryanto. 2018. *Dari Sumpah Pemuda (1928) Sampai Kongres Bahasa Indonesia (1938): Kajian Linguistik Historis Sekitar Masa – Masa*